

# Tingkatkan Kemampuan Kelola Keuangan Daerah

Abdul Khoir  
Borneo Tribune, Pontianak

Guna menyamakan pemahaman menyeluruh tentang

mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban dana atas beban APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Provinsi Kalbar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) ber-

tempat di hotel Kapuas Palace, Rabu (23/3).

Acara yang dilaksanakan selama dua hari tersebut dibuka oleh Sekertariat Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie. Merupakan tindak lanjut dari perubahan aspek pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu kepada upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang keseluruhan diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat.

"Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua

tahapan yang perlu diperhatikan yaitu tahapan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dan akuntansi keuangan daerah," jelas M Zeet—sapaan karib M Zeet Hamdy Assovie.

Dijelaskan M Zeet bahwa materi-materi tersebut merupakan materi yang nanti dipertanggungjawabkan kepada SKPD kepada kepala pemerintahan daerah sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah.

Pada tahun 2009 lalu, lanjut Assovie, Pemerintah Kalimantan Barat yang telah

...Ke Halaman - 2

M. ZEET  
HAMDY ASSOVIE

## Tingkatkan Kemampuan Kelola Keuangan Daerah

mendapat predikat Qualifite Opinion atau wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Kalbar, yang diketahui pada tahun sebelumnya mendapat predikat Dis-

claimer Opinion.

"Hal tersebut diperoleh berkat dukungan dan kerja keras dari setiap SKPD dan diharapkan ditahu kedepan akan mendapat predikat Unqualified Opinion (Wajar tanpa pengecualian)," im-

buhnya.

Guna mencapai predikat tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat sistem penatausahaan pengendalian

keuangan daerah serta memperbaiki sistim akuntansi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 55 tahun 2008.

Selain langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kali-

mantan Barat juga meningkatkan kemampuan personel yang memiliki pengetahuan akuntansi etika dan moralitas pengelola keuangan melalui peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan

daerah.

"Kita berikan pemahaman tentang kemampuan teknik operasional di setiap SKPD dengan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan," imbuhnya. □